

## **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Terhadap Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata di Kawasan Wisata Bukit Lawang Kabupaten Langkat**

### **Implementation of Regional Regulation Number 5 of 2020 Concerning the Development of Tourism Accessibility in the Bukit Lawang Tourism Area, Langkat Regency**

**Eka Wahyudi, Siti Hajar**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,  
Medan, Indonesia

\*email: wahyudieka000@gmail.com

#### **ABSTRACT**

*This study, entitled "Implementation of Regional Regulation Number 5 of 2020 on the Development of Tourism Accessibility in the Bukit Lawang Tourism Area, Langkat Regency," aims to analyse how the implementation of the regional regulation affects the development of tourism accessibility in Bukit Lawang. The background of this study is based on the importance of the tourism sector in the regional economy, as well as the need to improve accessibility for all tourists, including people with disabilities, in order to create an inclusive and sustainable tourism experience. The method used in this study is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with relevant informants, such as government officials, village heads, business actors, and tourists. The data obtained are analysed to understand communication, resources, dispositions, and bureaucratic structures that influence the implementation of regional regulations. The results of the study indicate that the implementation of Regional Regulation Number 5 of 2020 has been carried out with quite effective communication efforts between the regional government and the community.*

**Keywords:** *Public Policy, Tourism Policy, Tourism Development, Tourism Areas, Accessibility*

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Terhadap Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata di Kawasan Wisata Bukit Lawang Kabupaten Langkat" bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi peraturan daerah tersebut berpengaruh terhadap pembangunan aksesibilitas pariwisata di Bukit Lawang. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya sektor pariwisata dalam perekonomian daerah, serta kebutuhan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi semua wisatawan, termasuk penyandang disabilitas, guna menciptakan pengalaman wisata yang inklusif dan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada informan yang relevan, seperti pejabat pemerintah, kepala desa, pelaku usaha, dan wisatawan. Data yang diperoleh dianalisis untuk memahami komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 telah dilakukan dengan upaya komunikasi yang cukup efektif antara pemerintah daerah dan Masyarakat.

**Kata Kunci:** Kebijakan Publik dan Pariwisata, Pembangunan Pariwisata, Kawasan Wisata, Aksesibilitas

## **Pendahuluan**

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian daerah karena mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pelestarian budaya dan lingkungan. Bukit Lawang, sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, memiliki potensi besar dalam menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, aksesibilitas menuju kawasan ini masih menjadi kendala utama yang dapat menghambat pertumbuhan pariwisata secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 diharapkan mampu memberikan landasan hukum bagi pembangunan aksesibilitas yang memadai.

Penerapan kebijakan ini diharapkan dapat menjawab tantangan yang dihadapi sektor pariwisata di Bukit Lawang, mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga minimnya fasilitas ramah disabilitas. Aksesibilitas yang baik tidak hanya akan meningkatkan kenyamanan wisatawan, tetapi juga mendukung citra positif destinasi sebagai kawasan wisata inklusif dan berdaya saing. Dengan adanya regulasi yang jelas, pemerintah daerah dapat merancang strategi pembangunan yang terarah, efektif, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat.

Selain menjadi kawasan wisata alam yang menawarkan keindahan panorama dan konservasi satwa liar, Bukit Lawang juga memiliki nilai strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. Peningkatan jumlah wisatawan akan membuka peluang bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor perhotelan, kuliner, transportasi, dan jasa pariwisata lainnya. Namun, potensi ini tidak akan optimal tanpa adanya peningkatan aksesibilitas yang memadai, baik dari sisi infrastruktur maupun fasilitas pendukung wisata.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 juga diharapkan mampu menciptakan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengembangkan kawasan wisata yang berkelanjutan. Kebijakan ini menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor serta keterlibatan berbagai pihak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan pariwisata. Dengan demikian, pengelolaan destinasi dapat berjalan lebih terstruktur, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan wisatawan serta masyarakat lokal.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti. Analisis berarti memaknai dan menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian (Waruwu, 2023). Data dikumpulkan melalui wawancara dengan 4 narasumber, terdiri dari pejabat Dinas Pariwisata dan masyarakat lokal. Adapun Lokasi penelitian dilakukan di wilayah kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Langkat.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Penelitian ini akan membahas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Terhadap Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata di Kawasan Wisata Bukit Lawang Kabupaten Langkat, oleh karena itu hasil penelitian akan ditujukan menjadi jawaban dari rumusan masalah penelitian: Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Terhadap Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata di Kawasan Wisata Bukit Lawang Kabupaten Langkat. Dari rumusan masalah tersebut ada 4 kategorisasi yang akan dibahas dalam penelitian yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian dan pembahasan ini dilakukan dengan kondisi ataupun peristiwa yang terjadi di Lokasi penelitian. Tentunya temuan ini menyatakan hasil yang sesuai dengan lapangan dengan menjelaskan pendalaman isi kajian berupa wawancara langsung dan data yang ada, sehingga lebih jelas sesuai pada pelaksanaannya.

### **a. Komunikasi**

Menurut (Nurhadi & Kurniawan, 2017) bahwa komunikasi berlangsung manakala orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki kesamaan makna mengenai suatu hal yang tengah dikomunikasikannya itu. Dengan kata lain, jika orang-orang yang terlibat di dalamnya saling memahami apa yang dikomunikasikannya itu, maka hubungan antara mereka bersifat komunikatif. Menurut (Daud & Novrimansyah, 2022) mengatakan perlu memperhatikan proses komunikasi pembangunan yang menghadirkan sinergi antara lingkungan dan manusia. Pendekatan strategi komunikasi pembangunan yang digunakan memerhatikan juga konsentrasi pembangunan saat ini, yaitu: (1) Strategi komunikasi pembangunan partisipatif. (2) Strategi komunikasi konvergensi. Konsep *convergence* merupakan istilah yang digunakan Rogers dan

Kincaid (1981) dalam memperkenalkan salah satu model komunikasi untuk proses komunikasi antara komunikator dan komunikan yang terus-menerus sampai terjadi kesamaan pemahaman (mutual understanding). (3) Strategi lain yang perlu dipertimbangkan dalam proses komunikasi pembangunan adalah peran serta dan keterlibatan langsung media lokal dan sosial media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pembangunan pariwisata.

### **b. Sumber Daya**

Menurut (Maghfiroh & Suryana, n.d.) Bahwa, Sumber Daya Manusia merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh bagi kemajuan suatu lembaga. Tanpa sumber daya manusia yang berkualitas suatu lembaga tidak akan berkembang bahkan bisa mengalami kemunduran. Sumber daya manusia juga merupakan investasi sangat berharga bagi sebuah organisasi yang perlu dijaga. Peraturan Daerah di Bukit Lawang, telah didukung oleh kerangka hukum dan koordinasi lintas sektor yang efektif, tantangan utama dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan terletak pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal, termasuk pengelola, pelaku usaha, dan pemandu wisata, menjadi hambatan signifikan. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa kurangnya profesionalisme dan peran yang tidak optimal dari instansi terkait, seperti Dinas Pariwisata, menyebabkan kelompok sadar wisata (POKDARWIS) tidak memiliki eksistensi yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi SDM lokal, sehingga mereka dapat menjadi subjek aktif dan unggul yang mendukung keberhasilan pembangunan pariwisata, mengatasi orientasi manfaat ekonomi jangka pendek, dan meningkatkan daya saing global Indonesia.

### **c. Disposisi**

Menurut Wahab dalam (Dwi Ramadhani & Ali, n.d.) bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan sifat demokratis. Kepala Desa juga mendukung penuh pelaksanaan perda tersebut dengan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun, keterbatasan kapasitas warga dan dukungan anggaran menjadi tantangan yang harus diatasi agar perda tidak hanya menjadi regulasi formal, tetapi berdampak nyata bagi kemajuan desa. Secara keseluruhan, disposisi semua pihak cukup positif namun perlu ditindaklanjuti dengan langkah

nyata agar Perda No. 5 Tahun 2020 dapat memberikan manfaat optimal bagi pengembangan pariwisata di Bukit Lawang

#### **d. Struktur Birokrasi**

Menurut Edward III dalam (Arief & Hayati, 2021), mengatakan bahwa: struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah pecah atau tersebar red.) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif. Menurut Pakhudin, dkk (2022) mengatakan bahwa, dalam memperkuat struktur birokrasi, dalam penelitian diketahui tentang urgensi untuk membuat Badan Khusus untuk mengelola pariwisata Banten Lama sesuai amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada pasal 97 yang berisikan bahwa pada sebuah kawasan cagar budaya diperlukannya sebuah badan untuk mengelola, yang di dalamnya terdapat unsur dari pemerintah, akademisi, masyarakat atau komunitas dan media bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk mengembangkan potensi pariwisata Banten Lama.

#### **Penutup**

Kebijakan pembangunan aksesibilitas pariwisata di Kawasan Wisata Bukit Lawang Kabupaten Langkat telah terimplementasi namun belum sepenuhnya optimal hal ini diketahui berdasarkan kategorisasi penelitian. komunikasi dalam implementasi Perda No. 5 Tahun 2020 menunjukkan upaya pemerintah daerah yang cukup efektif. Berbagai pihak, mulai dari kepala desa hingga pelaku usaha, telah menerima informasi melalui pertemuan langsung dan media digital. Hal ini menunjukkan adanya proses komunikasi lintas sektor yang berjenjang dan terorganisir. Meskipun demikian, komunikasi masih memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki. Pelaku usaha mengeluhkan kurangnya detail teknis, sementara penundaan proyek strategis seperti pembangunan terminal baru menunjukkan kurangnya transparansi. Keluhan dari wisatawan dan warga lokal tentang minimnya sosialisasi juga mengindikasikan bahwa informasi belum tersampaikan secara merata.

Upaya peningkatan sumber daya manusia juga sudah dimulai dengan melibatkan pemuda dan masyarakat dalam pelatihan. Namun, kendala sumber daya masih menjadi tantangan signifikan. Pelatihan yang ada dianggap belum cukup intensif dan berkelanjutan, sehingga

pengetahuan dan keterampilan masyarakat masih terbatas. Selain itu, keterbatasan anggaran serta tantangan geografis juga menjadi hambatan dalam mewujudkan fasilitas yang lebih inklusif bagi semua kalangan.

### **Ucapan Terimakasih**

Ucapan Terima Kasih saya sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah begitu banyak memberikan ilmu, waktu, tenaga, saran, pikiran dan kesabarannya selama membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga saya sampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan informasi, data, serta masukan-masukan yang sangat berharga sehingga didapatinya hasil penelitian yang memuaskan.

### **Daftar Pustaka**

- Arief, A. F., & Hayati, R. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dilihat Dari Aspek Struktur Birokrasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis*, 4(2), 732–749.
- Daud, R. F., & Novrimansyah, E. A. (2022). Strategi Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Pada Daerah Wisata di Provinsi Lampung. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 3(2), 13–28. <https://doi.org/10.24853/independen.3.2.13-28>
- Maghfiroh, S., & Suryana, D. (n.d.). Media Pembelajaran untuk Anak Usia Dini di Pendidikan Anak Usia Dini.
- Nurhadi, Z. F., & Kurniawan, A. W. (2017). Komunikasi Sebagai Media. *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian*, 3(1), 90–95.
- Ramadhani, K. D., & Ali, M. (2023). Peran Guru Dalam Penerapan Kriteria Penilaian Dalam Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 4162-4169.